

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bonger, W.A, Pengantar Tentang Kriminologi. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen,
Jakarta: Pt. Pembangunan.
- Farid, Z. 2007, Hukum Pidana 1, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.
- Fajar, M Dan Achmad, Y. 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan
Empiris, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hamzah, A. 1991, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.
- Huda, C. 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap
Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana,
Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004, Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra
Aditya Bakti, Cetakan. III.
- Raharjo, Satijpto. 1983, Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru.
- Sedarmayanti, Hidayat, Syarifudin. 2011, Metodologi Penelitian, Jakarta: Mandar
Maju.
- Soekanto, Soerjono Dan Mahmudji, Sri. 2003, Penelitian Hukum Normatif, Suatu
Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Ui Pres, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1996, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ui Press.

Sunggono, Bambang. 2003, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Asnawi, M. I. (2019). Implikasi Yuridis Pengelolaan Pertambangan Dalam Aspek Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(1).

Anthoni, J., Albert, H. J., & Sandora, E. (2020). Tambang Ilegal Di Kabupaten Kutai Kartanegara Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara. *Collegium Studiosum Journal*, 3(2).

Dewi, R. S. (2019). Regulasi Pertambangan. *Yustitiabelen*, 5(1).

Efritadewi, A. (2020). Modul Hukum Pidana.

Espin, J., & Perz, S. (2021). Environmental Crimes In Extractive Activities: Explanations For Low Enforcement Effectiveness In The Case Of Illegal Gold Mining In Madre De Dios, Peru. *The Extractive Industries And Society*, 8(1).

Fitriyanti, R. (2018). Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi. *Jurnal Redoks*, 1(1).

Irmawan, A., Absori, S.H., & Harun, S.H. (2020). *Komparasi Hukum Perijinan Pertambangan Di Indonesia Dalam Perspektif Welfare State* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

- Kotijah, S. (2012). Pengaturan Hukum Pengelolaan Pertambangan Batubara Secara Berkelanjutan di Kota Samarinda. *Yuridika*, 27(1).
- Liyus, H., Rahayu, S., & Wahyudhi, D. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia. *Inovatif/ Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1).
- Maldini, R. (2019). *Perbandingan Sistem Pemidanaan Di Belanda Dengan Di Indonesia Dalam Upaya Penanggulangan Over Capacity Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Di Indonesia* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Unpas).
- Mansyah, N. (2013). Studi Tentang Dampak Pertambangan Batu Bara Bagi Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Jawa Kecamatan Sangasanga. *Administrasi Negara*, 1(3).
- Mas, M. (2012). Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim. *Jurnal yudisial*, 5(3).
- Mulka, S. R. (2020). Dinamika Konflik Masyarakat Dan Pemerintah Terhadap Dampak Pertambangan Batu Bara Di Kota Samarinda. *Praja: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(3).
- Oktaviani, Yohana Widya (2022). *Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pemulihan Lingkungan Oleh Korporasi*. Sarjana Skripsi, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
- Pandiangan, H. F. Y. (2022). Tinjauan Yuridis Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Sehingga Menyebabkan Kematian.

- Purba, Oloan (2012) *Upaya Polri Menanggulangi Penambangan Batubara Ilegal Di Kota Samarinda (Studi Kasus Di Poltabes Samarinda)*. Sarjana Thesis, Universitas Brawijaya.
- Putra, D. A. (2016). Eksistensi Sistem Hukum Perizinan Kegiatan Pertambangan Dalam Otonomi Daerah Sebagai Salah Satu Instrumen Hukum Hak-Hak Masyarakat. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1).
- Putra Astiti, T. I. Implementasi Pasal 33 Ayat 3 Uud 1945 Dalam Berbagai Perundang-Undangan Tentang Sumberdaya Alam. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4(1), 44179.
- Rahmawati, N. (2020). Konstruksi Hukum Reklamasi Terhadap Pelaku Pertambangan Ilegal. *Lorong: Media Pengkajian Sosial Budaya*, 8(1).
- Rori, J. G. (2019). Penjatuhan Hukuman Pidana Tambahan Pencabutan Hak-Hak Tertentu Oleh Hakim Dalam Kasus Korupsi. *Lex Crimen*, 7(9).
- Rozah, U. (2015). Azas Dan Tujuan Pidanaan Dalam Perkembangan Teori Pidanaan.
- Redi, A. (2016). Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(3).
- Safitri, A. A. (2016). *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Melalui Reklamasi Dan Pascatambang Oleh Investor Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara* (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).
- Syahaddina, N. G. (2011). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin di Kota Samarinda. *Risalah Hukum*.

- Sutarjo, S., Prayitno, H. J., & Azhari, A. F. (2015). *Analisis Penalaran Hakim Dalam Putusan Praperadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Klas Ia Khusus Surakarta Tahun 2011-2012)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Triyantoro, F., Prayitno, K. P., & Retnaningrum, D. H. (2021). Tindak Pidana Penambangan Pasar Ilegal (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 150/Pid. Sus/2019/PN Kbm). *Soedirman Law Review*, 3(3).
- Tyas, A. (2018). *Efektifitas Penerapan Ancaman Delik Kejahatan Narkotika di Kota Batam* (Doctoral dissertation, Universitas Internasional Batam).
- Wheny, N. D. R. (2017). *Penegakan Hukum Bagi Penyalahguna Narkoba Saat Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Polres Bangil)* (Doctoral Dissertation, University Of Muhammadiyah Malang).
- Yulianingrum, A. V., Absori, A., & Hasmiati, R. A. (2021, September). Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kesejahteraan Profetik (Studi Analitik Regulasi Mineral Dan Batubara Di Indonesia). In *Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Pembangunan*.
- Yulianingrum, A. V., Sunariyo, S., & Prasetyo, B. (2022). Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batubara Pada Negara Amerika, Cina, Indonesia (Studi Normatif Dan Perbandingannya). *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 10(2).
- Yusyanti, D. (2017). Aspek Perizinan Dibidang Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Pada Era Otonomi Daerah (Permit Aspects Of In The Legal Field Of Mineral And Coal Mining In The Era Of Regional Autonomy). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3).

Peraturan Perundang-undangan

Putusan Pengadilan Nomor 312/Pid.Sus/2019/PN.Smr

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu
Bara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Sumber Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring

Rio. (2022). *Kesal Tambang Ilegal Kaltim Tak Juga Ditindak, Petani Segel Alat Berat* <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220924180413-20-852178/kesal-tambang-ilegal-kaltim-tak-juga-ditindak-petani-segel-alat-berat> , Diakses Pada 08 Oktober 2022.

Intoniswan. (2021). *Pn Samarinda Vonis Penambang Batubara Secara Ilegal 1 Tahun 7 Bulan Dan Denda Rp1 Miliar* <https://www.niaga.asia/pn-samarinda-vonis-penambang-batubara-secara-ilegal-1-tahun-7-bulan-dan-denda-rp1-miliar/> , Diakses Pada 09 Oktober 2022.

Wahana Lingkungan Hidup Nusa Tenggara Timur, Dalam: Memahami
Pertambangan, Dampak Dan Tahapannya,

<http://walhintt.wordpress.com/2012/05/07/memahami-pertambahan-dampak-dan-tahapannya/> , Diakses Tanggal 21 Desember 2022.